

BAB 1

PEENDAHULAN

1.1 Latar Belakang

Partisipasi politik yakni salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi. Aktivitas ini mencakup berbagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan politik, termasuk pemilihan umum, pengawasan pemerintah, dan partisipasi dalam organisasi sosial. Di Indonesia, partisipasi politik masyarakat sangat penting untuk memastikan bahwa suara rakyat didengar dan diperhitungkan dalam pembangunan negara. Partisipasi politik adalah fenomena yang kompleks dan telah didefinisikan oleh berbagai ahli dalam bidang ilmu politik. Secara umum, keterlibatan dapat dipahami sebagai partisipasi politik individu atau kelompok dalam proses politik, termasuk pemilu, pengambilan keputusan, dan kegiatan politik lainnya. Berikut adalah beberapa.

Menurut (David Easton, 1953) seorang ahli teori politik, mendefinisikan partisipasi politik sebagai “proses di mana individu atau kelompok berinteraksi dalam sistem politik untuk mempengaruhi keputusan yang diambil oleh pemerintah.” Easton menekankan bahwa partisipasi ini tidak hanya terbatas pada pemilu, tetapi juga mencakup berbagai bentuk interaksi dalam konteks politik, seperti lobbying, demonstrasi, dan keterlibatan dalam organisasi masyarakat sipil. (Robert Dahl, 1992), seorang pakar demokrasi, menyatakan bahwa partisipasi politik yakni “keterlibatan yang aktif dari warga negara dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi hidup mereka”. (Robert Dahl, 1978), partisipasi adalah salah satu ciri utama dari demokrasi yang sehat. Ia

menyoroti pentingnya akses yang setara bagi semua individu untuk terlibat dalam proses politik,

sehingga keputusan yang diambil mencerminkan kehendak masyarakat. Dalam karya "Participation in America," yang ditulis oleh Sidney Verba dan Norman Nie (1972) mendefinisikan partisipasi politik "sebagai aktivitas yang dilakukan oleh individu untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah." Mereka mengidentifikasi berbagai bentuk partisipasi, mulai dari yang paling formal, seperti memilih dalam pemilu, hingga yang lebih informal, seperti menandatangani petisi atau menghadiri rapat umum. Mereka juga menekankan bahwa partisipasi politik dipengaruhi oleh unsur budaya, sosial, dan ekonomi.

Signifikansi Partisipasi Politik dalam Demokrasi: merupakan salah satu prinsip dasar demokrasi. Tanpa partisipasi yang aktif dari warganya, sebuah demokrasi tidak dapat berfungsi secara optimal. Dalam konteks ini, partisipasi politik tidak hanya terbatas pada hak suara dalam pemilu, tetapi juga mencakup berbagai bentuk keterlibatan lainnya yang memungkinkan masyarakat untuk berkontribusi ketika mengambil keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Berikut beberapa aspek yang menunjukkan signifikansi partisipasi politik dalam demokrasi?

1. Mewakili Suara Masyarakat Partisipasi politik memberikan kesempatan bagi warga negara untuk menyampaikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan mereka.

Dalam sebuah demokrasi, suara rakyat adalah sumber legitimasi bagi pemerintah. Ketika masyarakat terlibat dalam pemilu dan proses politik lainnya,

mereka membantu memastikan bahwa kebijakan yang diambil mencerminkan kehendak mayoritas. Tanpa partisipasi, keputusan yang diambil mungkin tidak mewakili kepentingan semua lapisan masyarakat, yang dapat mengakibatkan ketidakpuasan dan ketidakstabilan.

2. Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintah Partisipasi politik memungkinkan masyarakat untuk mengawasi dan menuntut akuntabilitas dari pejabat publik. Ketika warga negara aktif terlibat dalam proses politik, mereka dapat mengajukan pertanyaan, memberikan masukan, dan menuntut pertanggungjawaban atas tindakan pemerintah. Proses ini penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi. Dalam banyak kasus, tekanan dari masyarakat dapat mendorong pemerintah untuk lebih transparan dan responsif terhadap kebutuhan publik.

Partisipasi politik adalah elemen yang sangat penting dalam sebuah sistem demokrasi. Dari mewakili suara masyarakat hingga meningkatkan akuntabilitas pemerintah, partisipasi politik memainkan peran yang krusial dalam memastikan bahwa demokrasi berfungsi dengan baik. Keterlibatan masyarakat tidak hanya memberikan legitimasi bagi pemerintah, tetapi juga meningkatkan kualitas kebijakan dan mendorong stabilitas sosial. Dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya partisipasi, diharapkan masyarakat dapat terlibat lebih aktif dalam proses politik, sehingga demokrasi yang lebih kuat dan sehat dapat tercipta. Dalam konteks ini, upaya untuk meningkatkan partisipasi politik harus menjadi prioritas bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, individu, dan organisasi masyarakat sipil. Hanya dengan cara ini, kita dapat memastikan bahwa

demokrasi kita terus berkembang dan mampu menjawab tantangan zaman. Konteks Sosial dan Politik di Kota Kupang Kota Kupang, sebagai ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur, memiliki karakteristik sosial dan politik yang unik. Di tengah keragaman budaya dan latar belakang masyarakatnya, tantangan dalam meningkatkan partisipasi politik menjadi semakin kompleks. Dengan tingkat pendidikan yang bervariasi, akses terhadap informasi yang tidak merata, serta kesadaran politik yang berbeda-beda, KPU Kota Kupang dihadapkan pada tugas besar untuk menyatukan dan memberdayakan masyarakat dalam proses demokrasi.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki tanggung jawab yang penting untuk menyelenggarakan pemilu yang adil dan jujur. Tugas KPU tidak hanya terbatas pada penyelenggaraan pemilu, tetapi juga mencakup edukasi politik kepada masyarakat. KPU harus mampu menjelaskan pentingnya partisipasi politik dan mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam pemilu. Upaya ini penting untuk menciptakan pemilih yang cerdas, yang dapat membuat keputusan berdasarkan informasi yang akurat. Meskipun untuk meningkatkan partisipasi politik, KPU telah melakukan sejumlah inisiatif, namun masih terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi. Beberapa di antaranya meliputi: Kesadaran politik yang masih rendah. Banyak orang yang tidak menyadari betapa pentingnya memilih dalam pemilu. Hal ini dapat disebabkan oleh minimnya edukasi politik di tingkat masyarakat. Akses Informasi Tidak semua masyarakat memiliki akses yang sama terhadap informasi terkait pemilu dan proses politik. Hal ini mengakibatkan ketidakpahaman tentang hak-hak mereka sebagai pemilih. Sikap Apatisme Beberapa warga menunjukkan sikap apatis terhadap politik,

yang sering kali disebabkan oleh ketidakpuasan terhadap hasil pemilu sebelumnya atau kurangnya kepercayaan terhadap institusi politik.

Kesenjangan yang terjadi dalam penelitian ini yakni partisipasi Upaya KPU Kota Kupang KPU Kota Kupang berupaya untuk mengatasi tantangan tersebut melalui berbagai program dan inisiatif, Di antaranya adalah .Sosialisasi dan Edukasi KPU melaksanakan berbagai kegiatan sosialisasi untuk menjelaskan proses pemilu dan pentingnya partisipasi masyarakat. Kegiatan ini melibatkan tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, dan organisasi kemasyarakatan. Penggunaan Media Sosial Dalam era digital, KPU memanfaatkan media sosial sebagai platform untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas. Informasi mengenai pemilu disebarluaskan melalui berbagai saluran digital untuk menarik minat generasi muda. Kemitraan dengan Organisasi Masyarakat: KPU bekerja sama dengan berbagai organisasi masyarakat untuk mengadakan kegiatan yang dapat meningkatkan kesadaran politik, seperti diskusi, seminar, dan pelatihan.

Pasca reformasi 1998, Indonesia mengalami transformasi signifikan dalam sistem politiknya. Perubahan ini ditandai dengan transisi dari sistem otoritarian ke demokrasi yang lebih terbuka. Pemilu menjadi sarana penting untuk mengukuhkan demokrasi, memberikan kesempatan bagi rakyat untuk memilih wakil mereka dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Pemilu tidak hanya mencerminkan kehendak rakyat, tetapi juga menjadi alat untuk memeriksa akuntabilitas pemerintah. Seiring berjalannya waktu, pemilu di Indonesia semakin kompleks dengan adanya berbagai partai politik, kandidat independen, dan peningkatan partisipasi masyarakat. Namun, meskipun terdapat

kemajuan, tantangan tetap ada. Korupsi, politisasi identitas, dan konflik kepentingan sering kali mengganggu proses pemilu, mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem politik. Selain itu, polarisasi politik juga menjadi isu nyata yang mempengaruhi stabilitas dan integritas demokrasi di Indonesia.

Partisipasi politik di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satu yang utama yakni tingkat pendidikan. Orang yang berpendidikan tinggi biasanya lebih terlibat dalam politik, memahami isu-isu yang ada, dan berani menyuarakan pendapat mereka. Kesadaran politik juga berperan penting; kurangnya kesadaran menyeluruh tentang tugas dan hak sipil seseorang, banyak orang yang merasa apatis terhadap politik. Akses informasi menjadi faktor krusial lainnya. Di era digital saat ini, informasi yang mudah diakses dapat mendorong partisipasi. Namun, ketidakmerataan akses internet, terutama di daerah terpencil, masih menjadi hambatan. Selain itu, berita palsu dan desinformasi dapat mengaburkan pemahaman masyarakat tentang isu politik dan kandidat, yang pada akhirnya dapat mengurangi partisipasi. Dengan berbagai tantangan ini, penting bagi pemerintah dan masyarakat sipil untuk bekerja sama dalam meningkatkan kesadaran politik, pendidikan, dan akses informasi, guna mendorong partisipasi aktif dalam kehidupan politik.

Data dalam Pemilu 2019 sampai 2024, Indonesia mengalami peningkatan signifikan dalam jumlah golput atau pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya. Hal ini menjadi perhatian serius karena menandakan menurunnya partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi yang mendasar. Data yang dirilis oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) menjadi cerminan yang menggambarkan situasi ini secara jelas. Dari jumlah daftar pemilih tetap

(DPT pusat yang terbaru 2024) yang mencapai angka 204.807.200 pemilih, hanya 164.227.475 pemilih yang melakukan pencoblosan secara sah. Pertanyaan yang muncul adalah: mengapa terjadi peningkatan angka golput pada Pemilu 2024 sebesar 40,579725? Beberapa faktor dapat menjadi penyebabnya. Salah satunya adalah ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah atau partai politik yang dianggap tidak memenuhi harapan masyarakat. (Ghaitza Zahira Shofa¹, Ristania Tri Widiarti², Rochmawati Ing Lestari³, Nur Hasanah)

Kupang Di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Golongan Putih (Golput) atau pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya hanya naik 4% atau turun 4% pada pemilu presiden kemarin dibandingkan dengan 8% pada Pemilu Legislatif bulan April 2009. “Meskipun persentase pemilih yang abstain turun menjadi 4% pada pemilu presiden, persentase tersebut meningkat menjadi 8% pada pemilu parlemen bulan April 2009, yang memperoleh lebih dari 2,7 juta suara” kata ketua kelompok kerja tersebut. Seusai rapat pleno rangkuman penghitungan suara hasil Pilpres Kupang, Yoseph Dasi Djawa melakukan registrasi dan pemutakhiran data KPU Provinsi NTT, Ia juga menyebutkan, sekitar 2,8 juta orang memberikan suara pada Pilpres DPT Nusa Tenggara Timur (NTT).

Menurut Dasi Dajwa, 582.922 orang abstain pada pemilihan presiden (Pilpres) 8 Juli 2024, yang hanya mencakup 4,9% dari 2.813.529 pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di NTT. Di daerah dengan 4,5 juta pemilih itu, Dasi Djawa melaporkan 279.436 pemilih laki-laki dan 303.486 pemilih perempuan yang tersebar di 20 kabupaten dan kota tidak menggunakan hak pilihnya. Sementara dikelurahan RSS Oesapa sendiri dari jumlah daftar pemilih tetap

(DPT) sebesar 40,457 laki-laki 20,663 perempuan : 19,794 JML: 40,457, data golput 15,838.

Oleh karena itu, penulis terpacu untuk meneliti dan mengangkat pokok bahasan tersebut dalam sebuah lukisan berjudul **“PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) ,KOTA KUPANG DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DIKELURAHAN RSS OESAPA”**

1.2 Rumusan Masalah

Mengingat konteks diatas maka yang menjadi masalah dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran komisi pemilihan umum kota kupang dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat kelurahan Rss Oesapa ,kota kupang ,kecamatan kelapa lima?
2. Untuk melihat apa saja faktor-faktor yang mendukung/tantangan KPU dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat kelurahan Rss Oesapa?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana peran KPU dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat Kelurahan Rss Oesapa .
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat partisipasi politik masyarakat di Kelurahan Rss Oesapa

1.4 Manfaat Penelitian

Berikut ini adalah beberapa keuntungan teoritis dan praktis dari penelitian ini:

1. Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah: mampu mengembangkan pengetahuan ilmiah mengenai peran komisi pemilihan umum (KPU) dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Kelurahan Rss Oesapa.
2. Manfaat praktis penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat informasi dan masukan yang berguna bagi (KPU) dan masyarakat di Kelurahan Rss Oesapa sebagai panduan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat di Kelurahan Rss Oesapa.